

TESIS

**PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRA PERADILAN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945
GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN MASYARAKAT**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

OLEH :

**SYAHRIR KUBA
NPM : 201320252009**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS


**PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRA PERADILAN DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN MASYARAKAT**

OLEH :

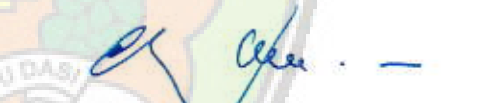
SYAHRIR KUBA
NPM 201320252009

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJI PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2016

Pembimbing I


Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II


Dr. Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

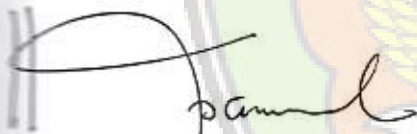

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : SYAHRIR KUBA
NPM : 201320252009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRA PERADILAN DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN MASYARAKAT

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



Dr. Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Prof. I Made Widnyana, SH., MH

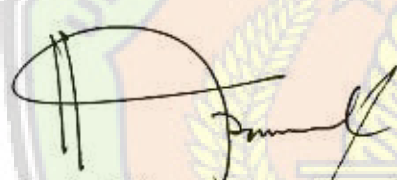
Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 20 Agustus 2016


Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/011/VIII/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua


: Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota


: 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM


2. Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SH., M.Sc



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : SYAHRIR KUBA

NPM : 201320252009

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 20 Agustus 2016



(SYAHRIR KUBA)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRIR KUBA
NPM/NIP : 201320252009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Pra Peradilan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2016
Yang menyatakan,


(SYAHRIR KUBA)

WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN!

**JADILAH KAMU SEBAGAI PENEGAK KEADILAN
KARENA ALLAH, (KETIKA) MENJADI SAKSI DENGAN
ADIL.**

**DAN JANGANLAH KEBENCIANMU TERHADAP SUATU
KAUM, MENDORONG KAMU UNTUK BERLAKU TIDAK
ADIL.**

**BERLAKU ADILLAH, KARENA (ADIL) ITU LEBIH DEKAT
KEPADA TAQWA.**

**DAN BERTAQWALAH KEPADA ALLAH, SUNGGUH,
ALLAH MAHA TELITI TERHADAP APA YANG KAMU
KERJAKAN.**

(Q.S. AL-MA'IDAH : 8)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan sekalipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik materi maupun penyusunannya, sehingga penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam menyusun Tesis, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta petunjuk dari berbagai pihak terutama oleh Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, selaku pembimbing I, Dr Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH selaku Pembimbing II. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kearifan.

Kepada keluarga penulis, yaitu isteri tercinta Hj.Darnawaty, dan ananda yang tersayang Syahrinawaty SE.Msi, Moch Rahmadhyan, SH, dan Moch Satrio Prawiro,SH yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dengan penuh pengertian dan ketulusan serta pengorbanan yang tidak ternilai hingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang tulus serta terimalah hasil karya ini sebagai salah satu Rahmat dan Prestasi yang kelak bermanfaat dalam perjalanan kehidupan keluarga.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya telah membantu dan memberi kesempatan kepada Penulis mengikuti Pendidikan S2 Ilmu Hukum hingga penyelesaian Tesis ini.
 2. Bapak Dr Anton Wachidin Wijaya, MM, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya, yang telah membantu dan menyediakan berbagai fasilitas selama Penulis mengikuti Pendidikan S2 Ilmu Hukum hingga penyelesaian tesis ini.
 3. Bapak Prof.I Made Widnyana, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
 4. Para Dosen dan Staf Program Pasca Sarjana yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti Pendidikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 5. Kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ucapan terimakasih ini, Penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuannya.
- Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan lindungan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan, Amin.

Jakarta , Juli 2016

Penulis

ABSTRAK

Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis dan memahami apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka oleh Penyidik berkaitan dengan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan di kaitkan dengan perwujudan keadilan Masyarakat.

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif (*Yuridis Dogmatis*) dengan pendekatan perundang-undangan, dan Analisis Konsep Hukum, guna mengetahui secara lebih terperinci konsistensi, kesesuaian dan eksistensi serta sejarah munculnya kebijakan Pra Peradilan di Indonesia dan penerapannya selama ini di kaitkan dengan tuntutan perlindungan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah berbagai keluhan dan laporan masyarakat terkait dengan penetapan tersangka yang dirasakan kurang adil dan beberapa kasus salah tangkap yang berujung pemidanaan, walaupun pada akhirnya di bebaskan, namun pemidanaan tersebut telah berimplikasi pada kerugian secara moril maupun materil pada korban.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka adalah karena hal tersebut merupakan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, sehingga perlu di uji dan di nilai keabsahannya oleh lembaga pra peradilan, agar tindakan sewenang-wenang penyidik dapat dinimalisir, sehingga masyarakat merasa mendapat perlindungan hukum, sesuai pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan adalah karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus mengedepankan asas *due process of law* sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dimana dalam negara hukum yang telah diadopsi oleh UUD 1945 dengan meletakkan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), sehingga dengan demikian mewajibkan kepada orang lain termasuk negara untuk menghormatinya. sesuai pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dan menurut pasal 28I ayat (5) harus di tuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga Hukum Acara Pidana yang Ada sesuai prinsip *Due Process of law*.

Kata kunci: Keadilan

ABSTRACT

Determination of Suspect as Pre-trial Object In Legal Protection Perspective based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to attain Community Justice

The purpose of this research is to perceive, analyze, and comprehend district court judge reason and consideration by accepting pretrial hearing petition related to the determination of suspect by Investigator related with society legal protection effort based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The other purpose of this research is to comprehend how constitutional court judge determine suspect as the object of pretrial hearing associated with embodiment of community justice.

The research method that writer use is normative juridical approach (Juridical-Dogmatic) method with regulation approach and analyzing legal concept, in order to perceive more spesific consistency, conformity, and existency of the pretrial hearing policy in Indonesia including the history of the pretrial hearing policy in Indonesia and its application with legal protection indictment and sense of community justice. The review of pretrial hearing case performed by analyzing various complaint and community report regarding determination of the suspect that perceived lack of justice and some wrongful arrest case that led to criminalization, even if in the end the suspect is released, but the impact of that criminalization is also result in material and moral loss for the victim.

The constitutional court judges of Central Jakarta reasoning by accepted pretrial hearing petition againts determination of the suspect is that pretrial hearing used by Investigator as forceful measures. This condition is the reason why that forceful measure must be tested and judged its validity by pretrial hearing institution. This action is important, so that misconduct measure by Investigator can be minimized, and the community will get legal protection, in accordance with Article 28D of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. Meanwhile, constitutional court judge consideration when determine suspect as pretrial hearing object is because Indonesia as state law must enforce due process of law principle as the manifestation of recognition of human right in criminal process. In due process of law principle that already adopted in the 1945 Constitution of Republic Of Indonesia, each person have human rights this include right of presumption of innocence. This human rights must be respected by all person including an state. As told in Article 28I verse (4) of The 1945 Constitution of The Republic Of Indonesia. Also as stated in Article 28I verse (5) of The Constitution of The Republic Of Indonesia, this human rights must be (dituangkan) in form of law, so that procedure of criminal law that exist will be done according to due process of law principles.

Keyword: Justice

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	11
3. Kerangka Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian.....	16

	1. Jenis Penelitian.....	16
	2. Pendekatan Masalah.....	16
	3. Data dan Sumber Data.....	16
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
	5. Teknis Analisis Data.....	18
	F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA.....	21
	A. Teori Negara Hukum.....	21.
	B. Teori Keadilan.....	26.
	1. Keadilan Prosedural.....	26
	2. Keadilan Substantif.....	27
	C. Teori Penegakan Hukum.....	28
	1. Penyelidikan.....	31
	2. Penyidikan.....	34
	3. Tersangka.....	40
	4. Pra Peradilan.....	44
	5. Perlindungan Hukum.....	45
BAB III	: PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM.....	47.
	A. Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka.....	47
	B. Tanggapan Penyidik Atas Gugatan Pra Peradilan Oleh Tersangka.....	57

C. Pertimbangan Hakim Pra Peradilan.....	65
D. Putusan Hakim Pra Peradilan.....	73
E. Pembahasan Dan Analisis.....	74
1. Proses Kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara	
Pidana.....	74
2. Penetapan Tersangka.....	78
3. Perlindungan Hukum.....	97
BAB IV : KEPUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI	
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI	
OBYEK PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN	
PERWUJUDAN KEADILAN MASYARAKAT.....	110
A. Penetapan Tersangka Yang Salah Sasaran.....	110
B. Uji Materi Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai	
Obyek Pra Peradilan.....	117
C. Tanggapan Pemerintah dan DPR.....	121
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	123
E. Putusan Hakim Konstitusi.....	127
F. Pembahasan dan Analisis.....	130
1. Proses Kelahiran Mahkamah Konstitusi.....	130
2. Penegakan Hukum Yang Mengedepankan Keadilan	131
3. Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Pra Peradilan..	145
4. Pra Peradilan Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat	148

BAB V	: PENUTUP.....	160
	A. Kesimpulan.....	160
	B. Saran.....	161
	DAFTAR PUSTAKA.....	163

